

PERAN PEMERINTAH DALAM MITIGASI BENCANA BANJIR BANDANG DI NAGARI BUKIK BATABUAH KABUPATEN AGAM

Fhadril Ilham¹, Zikri Alhadi²

^{1,2}Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

*Corresponding Author: fhadrililham38@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the role of the Nagari government and the challenges faced in efforts to mitigate flash flood disasters in Nagari Bukik Batabuah, Agam Regency, West Sumatra. This research uses a descriptive qualitative method with data collection techniques through direct observation and in-depth interviews. The results show that the Nagari government performs various roles, starting from the main role demonstrated through the responsive leadership of the Wali Nagari in decision-making during emergency disasters, such as relocating residents and rapid coordination with the BPBD. Additional roles are evident through the initiatives of the Nagari government in supporting the sustainability of the Kelompok Siaga Bencana(KSB) as supporting actors in mitigation. The formal role is carried out according to institutional mandates based on laws and regulations, including reporting to vertical agencies and activating emergency posts. On the other hand, the informal role is reflected in the organization of social relations and the utilization of community solidarity, such as placing refugees in the homes of relatives and involving residents in river monitoring on a rotating basis. The social role of the government is evident in the function of facilitating risk communication, even though it is not yet optimal as it remains one-way. Lastly, the cultural role emerges in the context of integrating local values such as mutual assistance in disaster management efforts, although it has not yet been systematically structured in mitigation policies. The implementation of mitigation faces structural and institutional challenges, including limitations in technical authority, delays in policy realization, a lack of logistics and training based on local risks, as well as low disaster literacy and cultural barriers in the community.

Keywords: *disaster mitigation, flash floods, community participation*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah nagari serta tantangan yang dihadapi dalam upaya mitigasi bencana banjir bandang di Nagari Bukik Batabuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah nagari peran utama ditunjukkan melalui kepemimpinan tanggap Wali Nagari dalam pengambilan keputusan saat darurat bencana, seperti relokasi warga dan koordinasi cepat dengan BPBD. Peran inisiatif pemerintah nagari dalam mendukung keberlanjutan Kelompok Siaga Bencana (KSB) sebagai aktor pendukung mitigasi. Peran formal dijalankan sesuai mandat kelembagaan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk pelaporan kepada instansi vertikal dan pengaktifan posko darurat. Peran informal terefleksi dalam pengorganisasian relasi sosial dan pemanfaatan solidaritas masyarakat, seperti penempatan pengungsi di rumah saudara dan pelibatan warga dalam pemantauan sungai secara bergiliran. Peran sosial pemerintah tampak dari fungsi fasilitasi komunikasi risiko, walau belum optimal karena masih bersifat satu arah. Peran kultural muncul dalam konteks integrasi nilai-nilai lokal seperti gotong royong dalam upaya penanganan bencana meskipun masih belum terstruktur secara sistematis dalam kebijakan mitigasi. Pelaksanaan mitigasi dihadapkan pada tantangan struktural dan kelembagaan, termasuk keterbatasan kewenangan teknis, keterlambatan realisasi kebijakan, minimnya logistik dan pelatihan berbasis risiko lokal, serta rendahnya literasi bencana dan hambatan kultural dalam masyarakat.

Kata kunci: *mitigasi bencana, banjir bandang, partisipasi masyarakat*

PENDAHULUAN

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Bencana pada pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Selain itu, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana juga mengatur tentang mitigasi bencana. Undang Undang tersebut mendefinisikan mitigasi sebagai serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana. Undang Undang ini juga mengatur tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko menimbulkan bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi. Dalam penanganan bencana terdapat tiga tahapan di mana yaitu tahap pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Tiga tahapan ini harus sangat diperhatikan dalam penanganan bencana oleh pemerintah.

Dalam pelaksanaan kegiatan mitigasi bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 pada pasal 15 menyebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b meliputi kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana. Kesiapsiagaan penanggulangan bencana dilaksanakan pemerintah untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadinya bencana.

Tabel 1 Profil Bencana Provinsi Sumatera Barat Periode 2014-2022

No	Jenis Bencana Alam	Jumlah	Rasio bencana (%)
1.	Angin kencang	3.505	55,9
2.	Longsor	1.161	19,5
3.	Banjir	853	13,6
4.	Karhutla	609	9,7
5.	Banjir bandang	107	1,7
6.	Abrasi pantai	39	0,6

Sumber: bpbdsbar.go.id 2023

Sebagaimana tabel di atas, memberikan data secara garis besar berapa banyaknya bencana yang terjadi di Sumatera Barat. Ada 6 jenis bencana alam yang sangat berpotensi terjadi di tingkat kabupaten/kota di wilayah Sumatera Barat (selain bencana gempa bumi dan tsunami).

Kabupaten Agam memiliki intensitas curah hujan yang tinggi di atas 200 mm membuat wilayah ini rentan terhadap bencana banjir bandang. Nagari Bukik Batabuah salah satu bagian dari 82 Nagari yang ada di Agam, Nagari Bukik Batabuah di Kecamatan Canduang ialah satu dari sekian banyak nagari yang terkena banjir bandang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pada tahun 2024. Nagari yang terletak di kaki Gunung Marapi ini ialah area yang memiliki sungai dengan berhulu ke gunung Marapi. Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang ialah salah satu nagari yang terkena banjir bandang di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat pada bulan Mei tahun 2024.

Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai sumber media dan laporan kelembagaan, tercatat setidaknya tiga peristiwa bencana

signifikan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga 2024. Peristiwa pertama terjadi pada tanggal 12 Mei 2021, ketika hujan deras menyebabkan banjir bandang melanda Jorong Batang Silasiah. Dalam kejadian tersebut, meskipun tidak terdapat korban jiwa, kerusakan fisik cukup masif terjadi pada lahan pertanian masyarakat, menyebabkan kerugian material yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

Peristiwa kedua tercatat pada tanggal 5 April 2024, di mana terjadi banjir lahar dingin yang menghanyutkan setidaknya tiga unit rumah warga di Jorong Kubang Duo. Meskipun kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun memberikan dampak psikologis yang signifikan bagi masyarakat, terutama saat musim hujan dengan intensitas tinggi.

Puncak dari rangkaian bencana ini terjadi pada tanggal 11 hingga 12 Mei 2024. Kejadian ini merupakan bencana banjir bandang terbesar dan paling merusak dalam sejarah Nagari Bukit Batabuah. Tercatat ratusan warga di Nagari Bukit Batabuah diungsikan sementara ke lokasi aman. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh pejabat Wali Nagari Bukit Batabuah, bapak Firdaus mengatakan "Ada ratusan warga kami yang diungsikan di lokasi sekolah dasar di jarak yang aman. Logistik berupa makanan, selimut dan kebutuhan harian sangat diperlukan.". Bapak Firdaus menyebutkan, ratusan rumah rusak dan puluhan hanyut terbawa arus akibat meluapnya aliran sungai yang berhulu langsung ke Gunung Marapi itu. Banjir bandang yang melanda beberapa daerah di Sumatera Barat (Sumbar) pada 11 Mei 2024 telah menyebabkan 67 korban jiwa dan 20 orang masih hilang (data BNPB per 16 Mei 2024).

Tragedi ini selain disebabkan oleh faktor alam, juga dipengaruhi oleh kelalaian dalam mitigasi dan pemetaan bencana. Wali Nagari Bukit Batabuah bapak Firdaus mengungkapkan bahwa permintaan mitigasi dan perbaikan infrastruktur pasca banjir bandang 5 April 2024 tak direspon oleh Pemkab Agam. Ia menduga kelalaian ini menjadi salah satu penyebab banjir lahar dingin kedua pada 11 Mei yang lebih dahsyat dan menelan 8 korban jiwa dari Bukit Batabuah. Permintaan mitigasi dan perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir bandang dan lahar dingin yang menerjang Bukit Batabuah 5 April diajukan ke Pemkab (Bupati Agam) dalam proposal di hari yang sama. Namun, hingga kejadian yang sama kembali menghantam lebih dahsyat pada 11 Mei, permintaan tersebut tak direspon. Akibatnya, Bukit Batabuah menjadi salah satu nagari paling terdampak dari banjir bandang lahar dingin.

Dalam hal mitigasi bencana pemerintah daerah dinilai belum maksimal, terutama untuk mengelola daerah aliran sungai yang terintegrasi serta pemberian edukasi atau penyuluhan terutama bagi mereka yang tinggal di daerah rawan bencana. Kepala departemen advokasi lingkungan hidup Walhi Sumbar Tommy Adam mengkritisi minimnya mitigasi bencana yang dilakukan pemerintah daerah, mengingat ancaman banjir bandang dapat terjadi sewaktu-waktu. Memperkuat mitigasi bencana di nagari-nagari yang dilewati sungai-sungai yang berhulu di Gunung Marapi harus dilakukan untuk mengurangi risiko bencana ke depan. Banyaknya korban bencana banjir bandang tak terlepas dari kelemahan mitigasi bencana.

Ahli geologi dan vulkanologi, Ade Edward (2022) berpendapat bahwa sebenarnya

bencana yang dipicu banjir bandang yang berhulu pada Gunung Marapi ini dapat diprediksi sehingga jumlah korban bisa diminimalisasi. Sebab, informasi dan data tentang risiko potensi bencana itu sudah disusun secara detail sejak akhir Desember 2023, beberapa pekan pasca status gunung itu dinaikkan menjadi Level III atau Siaga. Peta kawasan rawan bencana disusun Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). Peta itu juga sudah dikonversi pegiat kebencanaan di Sumbar ke Google Maps agar lebih mudah dipahami. Selain itu, peringatan dini cuaca ekstrem juga disampaikan BMKG untuk sepekan ke depan dan diperbarui setiap enam jam. Menurut Ade Edward, sejauh ini tidak ada sosialisasi dan pelatihan dari pemerintah kepada masyarakat terkait kesiapsiagaan dan mitigasi bencana yang dipicu banjir bandang yang bersumber pada lahar ditambah hujan lebat. Rambu-rambu bencana, jalur evakuasi, dan *shelter* juga tidak disiapkan.

METODE

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Menurut Straus dan Corbin dalam Eko Murdiyanto (2020) menyatakan bahwa penelitian kualitatif bisa dipakai dalam meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial ataupun keterkaitan kekerabatan.

Dalam buku Sugiyono (2017) metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D, jika dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, dan angket. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan hasil wawancara dan observasi lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Pemerintah dalam Mitigasi Bencana di Nagari Bukik Batabuah Kabupaten Agam

Peran pemerintah nagari berdasarkan UU nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dilihat dari penerapan prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana. Wali Nagari Bukik Batabuah, sebagai pemimpin utama di tingkat lokal, menunjukkan kepemimpinan yang sigap dan terukur (*prinsip cepat tepat*) dengan segera menghubungi BPBD dan menyelenggarakan rapat koordinasi hanya beberapa jam setelah kejadian. Tindakan relokasi warga merupakan keputusan penting yang mencerminkan tanggung jawab utama pemerintah nagari dalam menjaga keselamatan masyarakatnya (*prinsip prioritas*)

Keputusan ini diambil tidak hanya berdasarkan instruksi dari atas, tetapi juga dari penilaian langsung di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa Wali Nagari tidak hanya menjalankan fungsi administratif, melainkan mengambil inisiatif strategis sebagai aktor utama dalam mitigasi bencana, ini menggambarkan peran utama yang sangat menentukan arah kebijakan darurat lokal. (*prinsip koordinasi dan keterpaduan*) Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Firdaus selaku Wali Nagari Bukik Batabuah yang menyatakan:

“3 desember 2023, dengan adanya erupsi gunung Marapi yang di luar prediksi PVMBG waktu itu. Dan itu memang mengejutkan masyarakat dan pasca itu kita lakukan diskusi dan mencoba untuk menghubungi pemerintah kabupaten Agam dan instansi-instansi terkait dan terjadilah koordinasi, karena di waktu pas kejadian sekitar 10 menit sesudah kejadian saya langsung berkomunikasi via telepon BPBD

dan lainnya, kita langsung rapat koordinasi di kantor wali nagari sore itu langsung kira-kira apa langkah ke depan mengenai dengan erupsi gunung Marapi ini dan apa potensi selanjutnya sehingga ada masyarakat yang berada di radius 3km dari titik erupsi itu kita relokasi dulu sementara, sehingga kita mengambil keputusan waktu sebagai pemerintah nagari untuk merelokasi masyarakat itu ke rumah-rumah saudara masyarakat tersebut yang termasuk dalam zona aman (5- 10 km). Potensi kedepannya yakni banjir lahar dingin atau galodo, hal inilah yang bisa kita lakukan waktu itu, dan yang di instruksikan kepada kita hanya menyampaikan himbauan agar masyarakat tetap waspada serta hati-hati dan tidak beraktivitas dalam radius 3 km dari titik erupsi dan di bantaran sungai. (28/04/2025)"

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wali Nagari Bukik Batabuah, dapat dijelaskan bahwa pemerintah nagari memegang peran yang sangat sentral dalam sistem mitigasi bencana, khususnya saat menghadapi erupsi Gunung Marapi pada 3 Desember 2023. Kejadian tersebut berlangsung secara tiba-tiba dan berada di luar prediksi otoritas pemantauan gunung berapi (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi/ PVMBG), sehingga mengejutkan masyarakat sekitar. Dalam konteks ini, respons awal pemerintah nagari menunjukkan peran utama dalam pengelolaan risiko bencana di tingkat lokal.

Selain itu pemerintah nagari juga menjalankan peran memperkuat partisipasi masyarakat melalui dukungan terhadap kelompok siaga bencana (KSB) yang menunjukkan *prinsip berdaya guna dan berhasil guna*. KSB telah terbentuk sejak 2014, mengalami pembaruan pada 2018 dan menjadi mitra penting dalam pelatihan dan penanganan bencana. Pemerintah nagari berperan sebagai pihak yang mendorong

keberlanjutan kelompok ini, meskipun secara administratif KSB bukan bagian dari struktur pemerintahan formal. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Firdaus yang menyatakan:

"Kalau untuk kegiatan mitigasi kami di pemerintah Nagari Bukik Batabuah punya yang namanya Kelompok Siaga Bencana (KSB), waktu itu langsung kita aktifkan kelompok siaga bencana beserta lembaga-lembaga nagari lain waktu itu, salah satu kebijakan atau tindakan yang kami ambil waktu yaitu kita tetap jaga sungai atau pemantauan sungai secara bergiliran merujuk pada penyampaian BPBD waktu itu dikarenakan ruang lingkupnya sudah termasuk kepada BPBD bukan lagi nagari sehingga kami pemerintah nagari menunggu instruksi dari BPBD. (28/04/2025)".

Mitigasi bencana tidak hanya berkaitan dengan kebijakan makro yang bersifat struktural, tetapi juga sangat ditentukan oleh kebijakan taktis dan responsif di tingkat lokal. Dalam konteks Nagari Bukik Batabuah, pemerintah nagari menunjukkan peran aktif dalam menghadapi bencana banjir bandang yang berkaitan erat dengan erupsi Gunung Marapi. Salah satu bentuk keterlibatan nyata dari pemerintah nagari adalah pengaktifan Kelompok Siaga Bencana (KSB) secara langsung pasca-kejadian, serta pelibatan berbagai lembaga nagari lain dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dan koordinasi lapangan.

Di luar struktur formal, pemerintah nagari memainkan peran sebagai penggerak solidaritas masyarakat. Saat proses evakuasi awal dan relokasi warga berlangsung, jaringan sosial lokal seperti kerabat dan tetangga menjadi sumber daya penting. Pemerintah tidak mengandalkan fasilitas resmi seperti posko pengungsian, tetapi menggunakan pendekatan berbasis komunitas yakni menempatkan warga di

rumah saudara di zona aman.(*prinsip transparansi dan akuntabilitas*)

Selain itu, kegiatan pemantauan sungai secara bergiliran (*prinsip kemitraan*) yang dilakukan atas arahan pemerintah nagari juga menjadi contoh nyata bagaimana peran informal dapat diterjemahkan menjadi aksi mitigatif kolektif. Dalam konteks ini, pemerintah bertindak tidak berdasarkan mandat institusional, tetapi atas dasar kepercayaan sosial dan relasi kultural yang telah terbangun.

Kegiatan pelatihan pertolongan pertama, simulasi pemadaman api, dan pencarian orang hilang yang digelar sebelum erupsi merupakan contoh dari inisiatif-inisiatif mitigasi berbasis masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah nagari. (*prinsip pemberdayaan*) Walaupun pelatihan tersebut belum spesifik pada risiko erupsi dan banjir bandang, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mendukung peran sosial tambahan sebagai fasilitator kesiapsiagaan warga.

Pemerintah nagari juga menjalankan peran formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 dan PP No. 21 Tahun 2008. Pemerintah nagari merupakan bagian dari struktur kelembagaan dalam sistem penanggulangan bencana yang memiliki kewajiban untuk mengintegrasikan kegiatan mitigasi dalam perencanaan pembangunan lokal.

Tindakan seperti pelaporan situasi kepada BPBD, pengaktifan posko darurat, dan penjagaan terhadap kawasan rawan banjir lahar dingin merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan formal tersebut. Pemerintah nagari menjalankan fungsinya dalam struktur birokrasi secara aktif dan sesuai tupoksi (tugas pokok dan fungsi), termasuk menjaga alur koordinasi vertikal dengan pemerintah kabupaten dan dinas terkait.

Pemerintah nagari juga berperan sebagai aktor dalam peran sosial yang menghubungkan lembaga teknis dengan masyarakat. Peran ini terlihat melalui penyampaian himbauan kepada warga agar tidak beraktivitas di zona berbahaya pasca-erupsi. (*prinsip nondiskriminatif*) Namun, dari wawancara dengan tokoh pemuda, terungkap bahwa komunikasi ini masih berjalan satu arah dan belum cukup melibatkan masyarakat dalam diskusi mitigasi.

Masih banyak warga yang belum memahami risiko bencana secara utuh, dan bahkan informasi dari BPBD tidak selalu sampai secara tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa peran sosial pemerintah nagari masih harus diperkuat melalui komunikasi dua arah yang partisipatif agar masyarakat tidak hanya menjadi objek informasi, tetapi juga subjek aktif dalam proses mitigasi. Hal ini diperkuat dengan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Dedi Edward selaku tokoh masyarakat yang menyatakan:

“Kalau saya menilai, sebelum bencana banjir bandang kemarin, kesiapsiagaan masyarakat kita sebenarnya masih belum maksimal. Banyak warga belum benar-benar paham akan potensi ancaman seperti banjir bandang atau erupsi, namun sejak terjadi banjir lahar dingin sebelumnya masyarakat sudah mulai was-was atau waspada terkait dengan bencana susulan. Komunikasi antara masyarakat dan pemerintah sebenarnya sudah ada, tapi belum terlalu aktif dan belum terlihat pembicaraan yang timbal balik. Informasi dari BPBD atau pemerintah kadang datang terlambat, dan tidak semua warga langsung paham risikonya. Selain itu, budaya lokal juga berpengaruh seperti halnya ada anggapan bahwa selama tidak ada tanda-tanda alam, berarti tidak ada bahaya. Tapi di sisi lain, budaya gotong royong dan

kebersamaan sangat membantu saat penanganan pasca-bencana. (05/05/2025)"

Dari dimensi sosial budaya, terdapat hambatan yang cukup kompleks dalam upaya mitigasi bencana. Sebagian masyarakat masih berpegang pada keyakinan lokal atau persepsi tradisional, seperti anggapan bahwa bencana tidak akan terjadi selama tidak ada tanda-tanda alam tertentu. Hal ini menunjukkan adanya disonansi antara pengetahuan ilmiah dan persepsi budaya, yang menghambat terbentuknya kesiapsiagaan kolektif berbasis sains. (*prinsip non proletisi*)

Selain itu, pemerintah nagari menjalankan peran kultural dengan mengintegrasikan nilai-nilai lokal seperti gotong royong dan kebersamaan dalam penanganan bencana., budaya lokal juga menyimpan kekuatan besar dalam bentuk nilai gotong royong dan solidaritas sosial. Ketika bencana terjadi, masyarakat secara spontan bergerak membantu tanpa menunggu perintah formal. Sayangnya, pemerintah belum secara maksimal mengorganisir kekuatan sosial ini menjadi sistem mitigasi yang terstruktur, misalnya dengan melibatkan tokoh adat dalam sosialisasi risiko atau menjadikan kelompok masyarakat sebagai mitra aktif dalam simulasi bencana. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Reskyka selaku relawan bencana serta juga sebagai masyarakat yang terdampak dari bencana yang menyatakan bahwa:

"Saya tinggal di daerah bencana tersebut, namun rumah saya berada di daerah yang cukup tinggi sehingga terhindar dari banjir bandang, namun daerah di bawah langsung terdampak. Saya inisiatif keluar rumah setelah lewat tengah malam menuju daerah terdampak, dan ketika saya sampai banjir sudah mulai surut. Di sana sudah ada warga serta relawan terdekat yang telah turun tangan ikut membantu. Saya

membantu memberikan pertolongan pertama pada masyarakat hingga pagi datang. Barulah pada pagi harinya posko bencana dibuka. Dalam upaya tanggapan cepat bencana saya rasa kami sudah mengusahakan semaksimal mungkin, terkait bantuan logistik seperti alat berat atau bantuan logistik dalam skala besar baru tiba beberapa hari ketika BPBD dan instansi lainnya turun langsung di tempat bencana. (07/05/2025)"

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah nagari perlu mengembangkan pendekatan yang menggabungkan edukasi ilmiah dengan kearifan lokal, agar masyarakat bisa lebih terbuka terhadap informasi teknis tanpa kehilangan identitas budayanya.

2. Tantangan yang Dihadapi Pemerintah dalam Mitigasi Bencana di Nagari Bukik Batabuah Kabupaten Agam

Salah satu tantangan utama yang dihadapi pemerintah Nagari Bukik Batabuah adalah keterbatasan dalam hal struktur kewenangan dan kapasitas kelembagaan. Pemerintah nagari sebagai pemerintahan paling bawah dalam sistem administrasi Indonesia memiliki peran penting dalam pelaksanaan mitigasi bencana di tingkat komunitas. Namun, peran ini sering kali terhambat oleh minimnya kewenangan dalam mengambil keputusan teknis dan strategis, terutama terkait infrastruktur penanggulangan bencana.

"Jadi kejadian 5 April , di situ kami lakukan mitigasi dan mengkaji apa penyebabnya, memang dikarenakan gunung merapi yang erupsi. Dan faktor lainnya yaitu jembatan penyeberangan yang melewati sungai, jembatan ini menggunakan tiang penyangga yang terletak di tengah aliran sungai, serta sungai yang kecil juga dangkal, saya sendiri beranalogi waktu itu, kalau sungai itu diperlebar dan diperdalam lalu tiang jembatan itu dirobohkan, maka kalaupun

terjadi yang bencana yang lebih besar tidak lagi akan meluap seperti yang terjadi pada tanggal 5 April sebelumnya. Itulah yang kita minta pada pemerintah kabupaten agam dan pemerintah provinsi, dan waktu itu langsung dikunjungi oleh bapak gubernur, dan di lokasi jembatan itu juga bapak gubernur berjanji akan membangun kembali jembatan ini sebagai bentuk upaya pembaharuan jembatan sesuai dengan analogi sebelumnya, cuman itu pembaharuan jembatan ini dijanjikan dilaksanakan bulan Februari 2025, nah ini kan ada rentang waktu. namun, siapa yang bisa memprediksi itu bencana terjadi bahkan sebelum waktu yang dijanjikan terlaksana”

Sebagaimana ditunjukkan dalam hasil wawancara dengan Wali Nagari Firdaus, meskipun pemerintah nagari telah melakukan kajian lokal atas penyebab banjir dan memberikan rekomendasi konkret—yakni memperlebar dan memperdalam sungai serta merobohkan jembatan dengan tiang di tengah aliran sungai—implementasi tetap berada di tangan pemerintah kabupaten atau provinsi. Ketergantungan ini menunjukkan adanya fragmentasi tanggung jawab antara level pemerintahan, yang sering kali menyebabkan keterlambatan implementasi meskipun perencanaan sudah tersedia.

Keterbatasan sumber daya baik manusia, logistik, maupun finansial menjadi tantangan berikutnya. Pemerintah nagari tidak memiliki kapasitas logistik yang memadai untuk menangani tanggap darurat secara mandiri. Sebagaimana diungkapkan oleh Berliana Reskyka, bantuan alat berat dan logistik skala besar baru tiba beberapa hari setelah BPBD turun ke lokasi, sementara pada saat kejadian hanya ada dukungan dari relawan lokal.

Ketidadaan logistik dasar yang terdesentralisasi menunjukkan bahwa kemandirian lokal belum terbentuk secara

optimal. Pemerintah nagari belum memiliki gudang logistik bencana, posko tanggap darurat yang siap setiap saat, ataupun sistem pendukung teknis seperti radio komunikasi dan sistem peringatan dini berbasis komunitas.

Dari sisi sumber daya manusia, pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada Kelompok Siaga Bencana (KSB) juga masih terbatas pada keterampilan dasar seperti pertolongan pertama dan pemadam kebakaran, bukan pada mitigasi risiko geologis seperti lahar dingin atau erupsi gunung berapi. Hal ini memperlihatkan bahwa program peningkatan kapasitas belum didasarkan pada pemetaan risiko lokal.

Tantangan lain yang cukup mendasar adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap potensi risiko bencana yang mengancam wilayah mereka. Sebagian besar masyarakat belum menyadari bahwa Nagari Bukik Batabuah merupakan daerah rawan terhadap galodo dan erupsi Gunung Marapi. Hal ini ditunjukkan dalam wawancara dengan Dedi Edward yang menyebutkan bahwa sebelum bencana terjadi, kesadaran masyarakat masih sangat minim, dan informasi yang datang dari pemerintah maupun BPBD sering terlambat serta tidak sepenuhnya dipahami oleh warga.

Hal ini memperlihatkan bahwa edukasi risiko belum dijadikan bagian integral dari kebijakan mitigasi pemerintah nagari. Tidak adanya strategi komunikasi risiko yang terencana dan dua arah menyebabkan masyarakat hanya menjadi penerima informasi pasif, bukan aktif dalam upaya mitigasi. Idealnya, pemerintah nagari harus menyelenggarakan sosialisasi secara berkala, membentuk sistem peringatan komunitas, dan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga kebencanaan untuk mendistribusikan informasi yang akurat dan tepat waktu.

Dari dimensi sosial budaya, terdapat hambatan yang cukup kompleks dalam upaya mitigasi bencana. Sebagian masyarakat masih berpegang pada keyakinan lokal atau persepsi tradisional, seperti anggapan bahwa bencana tidak akan terjadi selama tidak ada tanda-tanda alam tertentu. Hal ini menunjukkan adanya disonansi antara pengetahuan ilmiah dan persepsi budaya, yang menghambat terbentuknya kesiapsiagaan kolektif berbasis sains.

Namun demikian, budaya lokal juga menyimpan kekuatan besar dalam bentuk nilai gotong royong dan solidaritas sosial. Ketika bencana terjadi, masyarakat secara spontan bergerak membantu tanpa menunggu perintah formal. Sayangnya, pemerintah belum secara maksimal mengorganisir kekuatan sosial ini menjadi sistem mitigasi yang terstruktur, misalnya dengan melibatkan tokoh adat dalam sosialisasi risiko atau menjadikan kelompok masyarakat sebagai mitra aktif dalam simulasi bencana.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah nagari perlu mengembangkan pendekatan yang menggabungkan edukasi ilmiah dengan kearifan lokal, agar masyarakat bisa lebih terbuka terhadap informasi teknis tanpa kehilangan identitas budayanya.

KESIMPULAN

Pemerintah nagari menjalankan peran utama melalui kepemimpinan lokal yang responsif dan pengambilan keputusan yang cepat, terutama dalam fase darurat pasca-kejadian banjir bandang dan telah menerapkan prinsip penanggulangan bencana dengan baik. Ini ditunjukkan melalui tindakan tanggap seperti koordinasi dengan BPBD dan relokasi warga ke zona aman. Selain itu, pemerintah juga berperan sebagai fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat, pelaksana teknis regulasi, serta penggerak modal sosial

dan budaya lokal. Dukungan terhadap KSB, pemanfaatan jaringan sosial lokal, serta penggunaan pendekatan gotong royong dan nilai tradisional menjadi bukti bahwa pemerintah mengintegrasikan peran-peran tersebut dalam konteks mitigasi.

Pemerintah Nagari Bukik Batabuah menghadapi beragam tantangan dalam pelaksanaan mitigasi bencana, baik dari aspek struktural, teknis, sosial, maupun budaya. Pertama, keterbatasan kewenangan dan kapasitas kelembagaan menyebabkan pemerintah nagari tidak memiliki wewenang eksekusi yang memadai meskipun memiliki pemahaman lokal yang kuat. Fragmentasi tanggung jawab antarlevel pemerintahan berdampak pada lambatnya implementasi kebijakan mitigasi di lapangan. Kedua, terdapat kesenjangan serius antara perencanaan dan waktu respons. Realisasi program seringkali tidak sejalan dengan urgensi di lapangan, sehingga masyarakat tetap rentan terhadap ancaman bencana yang datang secara tiba-tiba. Ketiga, keterbatasan kapasitas teknis dan sumber daya—baik manusia, logistik, maupun finansial menghambat kemandirian pemerintah nagari dalam menghadapi situasi darurat. Kesiapan logistik dan pelatihan berbasis risiko lokal masih sangat minim. Keempat, rendahnya literasi kebencanaan masyarakat mengindikasikan lemahnya strategi edukasi risiko yang dilakukan oleh pemerintah.

Ketidaktahuan warga terhadap potensi bencana lokal membuat mereka belum terlibat secara aktif dalam mitigasi. Kelima, tantangan budaya juga berkontribusi terhadap lambatnya kesiapsiagaan kolektif, meskipun di sisi lain, nilai-nilai lokal seperti gotong royong merupakan potensi besar yang belum terorganisir secara sistematis dalam kerangka mitigasi bencana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, S. (2013). Karakterisasi Bencana Banjir Bandang di Indonesia. *Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia*, 15(1), 42–51.
- Adiyoso, W. (2018). Manajemen Bencana: Pengantar isu-isu strategis. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bungin, B. (2020). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya. Jakarta: Kencana
- Chazienul, M.U. (2014). Manajemen Bencana: Suatu Pengantar Pendekatan Proaktif. Malang: UB Press.
- Hermon, D. (2012). Mitigasi Bencana Hidrometeorologi (Banjir, Longsor, Ekologi, Degradasi Lahan, Puting Beliung, Kekeringan). Padang: UNP Press.
- Jalaludin, s. (2021). Pencegahan Mitigasi Bencana (Teori dan Praktik). Solok-Sumatera Barat: Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim.
- Murdiyanto, Eko. (2020). Penelitian kualitatif (teori dan aplikasi disertai contoh proposal). Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
- Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan r&d. Bandung: Alfabeta.

Jurnal

- Nawi, R, & Herianto, D. (2025). Analisis Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana Alam di Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal Social Engagement (Jurnal Pengabdian Masyarakat)*.
- Nursyabani, Putera, R. E., & Kusdarini. (2020). Mitigasi Bencana Dalam Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Ancaman Gempa Bumi di Universitas

- Andalas. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (asian)*, 8(2)
- Prayoga, A .(2015). Peran Pemerintah Kota Dalam Pembangunan Fisik di Wilayah Batu Cermin Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, vol 3 no.1
- Putri, Destiani Utami, dwi melliani, dkk. (2021). Iklim organisasi kelurahan dalam perspektif ekologi. *Jurnal Inovasi Inovasi Penelitian*. Vol. 1 no. 12.
- Putri, M. E., & Ikhwan. (2024). Analisis Dampak Banjir Lahar Dingin Gunung Marapi Sumatera Barat 2024. *Jurnal inovasi pendidikan*, 7(5).

Peraturan

- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana